

LAPORAN PENANDAAN ANGGARAN DAERAH UNTUK PERUBAHAN IKLIM KOTA PEKALONGAN

DRAFT PER 3 OKTOBER 2023

Tim Penulis dan Editor:

Inda Loekman

Hery Sulistio

Sigit Murwito

Amalia Fubani

Arif Nurdiansah

Tities Eka Agustine

Hana Alfahani

Riana Ekawati

Regitri Darmawan

Diterbitkan oleh:

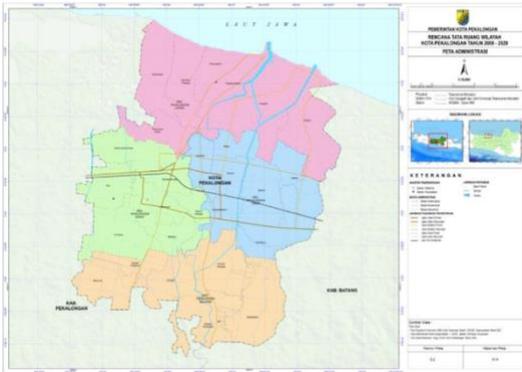
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintah
(The Partnership for Governance Reform)

Jl. Taman Margasatwa Raya No.26, RT.8/RW.1, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550

Didukung oleh:

Oak Foundation dan International Development Research Centre (IDRC), Kanada

1. Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah



Gambar 6. Peta Wilayah Administrasi Kota Pekalongan

Permasalahan Lingkungan dan Kebencanaan

- **Kerentanan Kota Pekalongan semakin bertambah karena faktor geomorfologi dan dampak perubahan iklim.** Kota Pekalongan memiliki wilayah yang sangat datar dengan ketinggian dibawah permukaan air laut, sehingga berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air, terutama drainase. Pengelolaan sumber daya air yang menjadi tantangan semakin berat karena terjadinya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak dari kedua fenomena tersebut mengakibatkan pekalongan kerap dilanda permasalahan banjir dan rob karena terjadinya kenaikan permukaan air laut.
- **Sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, perikanan dan industri kreatif seperti batik dihadapkan pada isu lingkungan hidup dan dampak perubahan iklim.** Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir. Bahkan sektor perikanan telah memiliki kecenderungan penunahan produksi. Industri batik yang menjadi penjenamaan (*branding*) Kota Pekalongan juga harus berhadapan dengan isu limbah industri, penurunan lahan dan ketersediaan air sehingga mempengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri.
- **Walaupun Kota Pekalongan dihadapkan dengan sejumlah kerentanan, namun diharapkan sebagai kota penyangga yang cukup strategis.** Selain sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah¹, juga termasuk dalam wilayah pengembangan Petanglong dengan arah pengembangan yang meliputi sektor unggulan di bidang industri perdagangan, jasa, pertanian dan perikanan. Lebih jauh lagi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan akan dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Kota (KSK) yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan.

Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah

- **Kebijakan strategis dalam penanggulangan kerentanan bencana tertulis pada visi keempat terkait “Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan.”** Misi ini bertujuan untuk menurunkan genangan banjir dan rob, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menjamin ketersediaan infrastruktur dasar. Program-program yang diimplementasikan pada misi ini tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang menjadi fokus penanganan banjir dan rob, namun juga terkait konektivitas jalan dan infrastruktur lalu lintas. Selain itu, peningkatan kualitas lingkungan melalui peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga menjadi fokus dalam misi ini.
- **Kota Pekalongan belum memiliki rencana aksi daerah (RAD) terkait perubahan iklim, namun isu lingkungan dan perubahan iklim telah menjadi isu strategis dalam dokumen perencanaan daerah.** Permasalahan lingkungan dan kerawanan bencana yang dialami oleh Kota Pekalongan, menjadi latar belakang kebijakan pembangunan daerah. Arah pembangunan pun difokuskan pada pembangunan

¹ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029.

infrastruktur yang mendukung penanganan bencana dan pencemaran lingkungan. Selain itu, konektivitas menjadi hal yang penting dari Kota Pekalongan sebagai salah satu kota penyangga.

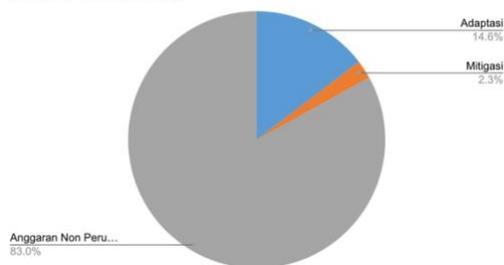
2. Perekonomian Daerah

- **Pendapatan terbesar di Kota Pekalongan bersumber dari dana perimbangan (rata-rata 76,92 persen) pada tahun 2015-2019.** Sedangkan sumber pendapatan asli daerah rata-rata 21,47 persen, pendapatan lainnya dari sumber yang sah rata-rata 1,59 persen sehingga dapat disimpulkan kapasitas pendanaan kegiatan daerah masih bergantung pada anggaran pemerintah pusat dan provinsi.
- **Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengolahan dan konstruksi yang berkontribusi pada PDRB Kota Pekalongan.** Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2020 adalah pada lapangan usaha Industri Pengolahan yakni 21,40 persen dan ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yakni 20,85 persen, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,16 persen dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 21,80 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,60 persen dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni 14,64 persen.

3. Analisis Penandaan Anggaran Daerah untuk Perubahan Iklim

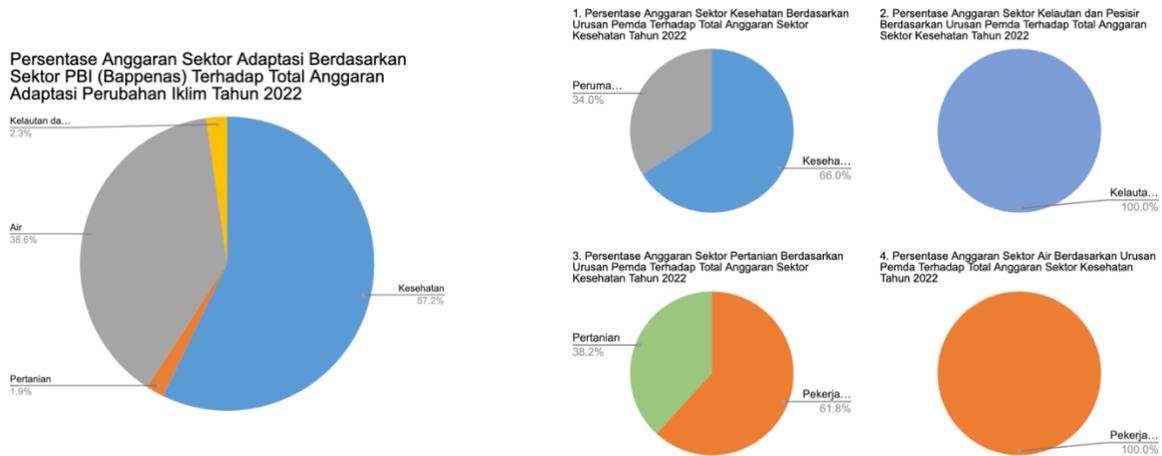
Analisis Penandaan Anggaran Daerah untuk Perubahan Iklim

Persentase Anggaran Perubahan Iklim Terhadap Total APBD-P Tahun 2022



Potensi anggaran Kota Pekalongan untuk aksi adaptasi lebih besar dibandingkan dengan aksi mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan hasil penandaan anggaran, terdapat potensi anggaran daerah untuk mendorong aksi adaptasi perubahan iklim sebesar 14,65 persen terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2022. Sedangkan untuk aksi mitigasi terdapat potensi sebesar 2,34 persen atau sebesar 25 milyar rupiah. Anggaran aksi adaptasi lebih besar karena perencanaan penganggaran terkait isu kesehatan, infrastruktur, pengendalian banjir dan pertanian memiliki keselarasan dengan visi dan misi Pemkot Pekalongan.

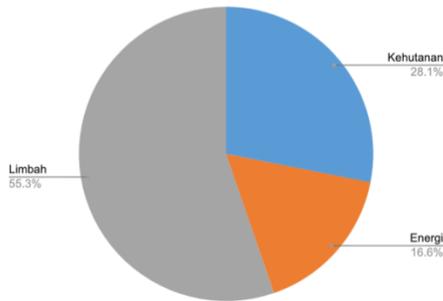
Analisis Penandaan Anggaran Daerah untuk Aksi Adaptasi Perubahan Iklim



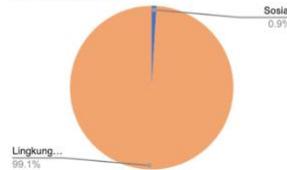
- Pemerintah Kota Pekalongan memiliki prioritas pada sektor kesehatan dan sumber daya air untuk mendorong aksi adaptasi perubahan iklim.** Sektor kesehatan terdiri dari urusan kesehatan dan Perkim yang masing-masing memiliki potensi anggaran sebesar 5,53 persen dan 2,84 persen. Urusan Perkim memiliki program terkait embangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan dan penyelenggaraan PSU perumahan yang mendukung sasaran pada isu strategis ketiga “Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan infrastruktur Lingkungan Permukiman.” Sedangkan urusan kesehatan memiliki program yang berupaya meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat, selain itu juga menyediakan sarana prasarana bidang kesehatan.
- Pembangunan infrastruktur sumber daya air pada aksi adaptasi bertujuan untuk mendorong sektor pertanian, penanggulangan banjir dan drainase.** Merujuk pada kerentanan Kota Pekalongan terkait dengan banjir pemerintah berupaya menanggulangi banjir dengan menganggarkan program terkait pembangunan tebing, tanggul sungai dan penyediaan pompa banjir. Selain itu, pembangunan drainase dan SPAM juga teridentifikasi dalam potensi anggaran perubahan iklim. Sedangkan pada sektor pertanian, dukungan program rehabilitasi jaringan irigasi permukaan juga dianggarkan sebesar 1 milyar rupiah.
- Potensi anggaran terkait sektor kelautan dan pesisir juga teridentifikasi lebih tinggi dari sektor pertanian.** Sektor perikanan dan kelautan juga memiliki kerentanan dan sektor yang terdampak jika terjadi banjir, rob dan perubahan iklim sehingga pemerintah menganggarkan program pemberdayaan bagi nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Selain itu dukungan sarana prasarana dalam penangkapan, pemasaran, pengelolaan kesehatan ikan serta sumber informasi terkait sumber daya ikan juga telah dialokasikan pada APBD-P tahun 2022 oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Analisis Penandaan Anggaran Daerah untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

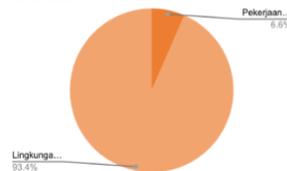
Persentase Anggaran Sektor Mitigasi Berdasarkan Sektor Aksi Mitigasi (KLHK) Terhadap Total Anggaran Sektor Mitigasi Perubahan Iklim Tahun 2022



1. Persentase Anggaran Sektor Kehutanan Berdasarkan Urusan Pemda Terhadap Total Anggaran Sektor Kehutanan Tahun 2022



2. Persentase Anggaran Sektor Limbah Berdasarkan Urusan Pemda Terhadap Total Anggaran Sektor Limbah Tahun 2022



3. Persentase Anggaran Sektor Energi Berdasarkan Urusan Pemda Terhadap Total Anggaran Sektor Energi Tahun 2022

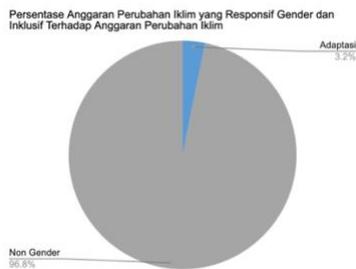


- **Penanganan limbah memiliki alokasi yang cukup besar (1,28 persen) jika dibandingkan seluruh sektor dalam aksi mitigasi perubahan iklim.** Sektor lainnya, seperti kehutanan (0,65 persen), sektor energi sebesar 0,39 persen dan sektor pertanian serta IPPU yang tidak memiliki potensi alokasi anggaran. Besaran alokasi anggaran terkait limbah digunakan untuk program terkait Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dan Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3). Program tersebut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi dampak lingkungan yang terhadap industri batik sebagai industri unggulan di Kota Pekalongan.
- **Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim sebagai komitmen awal Kota Pekalongan dalam menyusun kebijakan terkait perubahan iklim.** Dalam dokumen APBD-P tahun 2022 terdapat alokasi sebesar 28 juta rupiah untuk kegiatan tersebut. Namun, perlu dilakukan konfirmasi kepada Pemda untuk memastikan output dari kegiatan dalam kebijakan daerah (Perda/Perkada) terkait aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- **Sebagai salah satu kota penyangga, Kota Pekalongan memiliki program terkait peningkatan sarana transportasi masal dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mengurangi peningkatan emisi GRK.** Sektor perhubungan memiliki potensi anggaran sebesar 0,30 untuk mendukung upaya aksi mitigasi dalam sektor energi (sebesar 0,39). Permasalahan pencemaran udara dan kemacetan menjadi problem dalam masyarakat urban, sehingga pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program tersebut memiliki kegiatan terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan

sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin. Sedangkan sektor kehutanan dialokasikan untuk meningkatkan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Pekalongan.

- **Sayangnya, aksi mitigasi pada sektor pertanian dan IPPU belum teridentifikasi pada anggaran daerah.** Sektor pertanian pada aksi mitigasi difokuskan pada pengelolaan pertanian rendah emisi. Begitu pula dengan sektor IPPU yang berupaya untuk mendorong pengelolaan limbah industri dan pengelolaan industri yang rendah emisi.

Analisis Anggaran Perubahan Iklim Responsif Gender dan Inklusif



- Dalam anggaran perubahan iklim, terdapat anggaran yang responsif gender dan inklusif sebesar 3,2% terhadap total anggaran perubahan iklim (Rp 5,868,662,000).
- Seluruh alokasi anggaran responsif gender dan inklusif merupakan teridentifikasi untuk kegiatan adaptasi sebesar 3,2% terhadap total anggaran perubahan iklim tahun 2022.

Penandaan Anggaran Kota Pekalongan Untuk Ketahanan Iklim



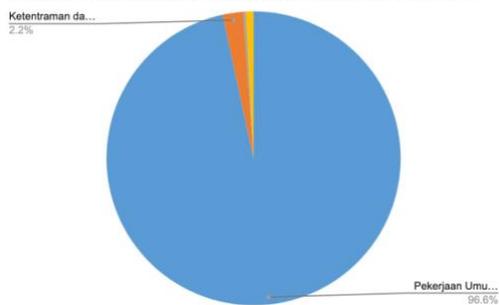
- **Analisis penandaan anggaran Kota Pekalongan untuk ketahanan iklim teridentifikasi sebesar 15,78% terhadap total APBD-P Tahun 2022 atau Rp 171,990,164,000.** Penandaan anggaran ketahanan iklim ini dianalisis berdasarkan rencana aksi dan sektor-sektor yang terdapat dalam ENDC 2022. Pada anggaran ketahanan iklim tersebut, sebesar Rp 25,136,000 (0,002% terhadap anggaran APBD-P 2022) merupakan anggaran untuk aksi mitigasi. Sedangkan sebesar Rp 171,965,028,000 (15,8% terhadap anggaran APBD-P 2022) untuk aksi adaptasi.
- **Berdasarkan sektor dalam ENDC 2022, teridentifikasi tiga sektor dengan anggaran terbesar pada sektor ketahanan sosial dan penghidupan (91,28% terhadap total anggaran adaptasi ketahanan iklim).** Selain itu untuk anggaran ketahanan ekonomi teridentifikasi sebesar 2,45% serta anggaran untuk ketahanan ekosistem dan lanskap sebesar 6,26% terhadap total anggaran adaptasi ketahanan iklim. Hal yang menjadi catatan untuk konteks Kota Pekalongan adalah memulihkan kerusakan lingkungan akibat limbah industri dan kerentanan pada ecoregion fluvial marin yang meningkatkan bencana di wilayah pesisir. Mengingat kondisi tersebut, pemerintah perlu memperhatikan alokasi anggaran pada aspek ketahanan ekosistem dan lanskap seperti

pembangunan EBT, pengelolaan dan pemanfaatan limbah sektor yang menyumbang emisi seperti sektor industry di Kota Pekalongan.

- **Dalam anggaran ketahanan iklim juga teridentifikasi anggaran responsif gender dan inklusif sebesar 4,25% terhadap total anggaran ketahanan iklim (Rp 7,316,908,000).** Anggaran ini berupaya untuk memperkuat ketahanan perempuan dan kelompok rentan dalam meningkatkan kapasitas ketahanan iklim di Kota Pekalongan. Alokasi anggaran responsif gender sebagian besar merespon isu sosial dan kebencanaan serta pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintahan.

4. Analisis Penandaan Anggaran Daerah untuk Ketahanan Bencana

Persentase Anggaran Ketahanan Bencana Berdasarkan Urusan Pemda Terhadap Anggaran Ketahanan Bencana Tahun 2022



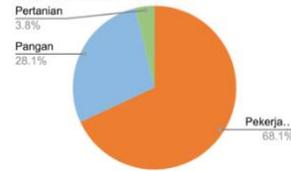
- **Upaya meningkatkan kewaspadaan bencana dan penanggulangan bencana dilakukan dengan pembangunan infrastruktur berupa tanggul dan pompa banjir, memberikan pengetahuan kebencanaan kepada masyarakat dan identifikasi serta pembangunan perumahan bagi korban bencana.** Jumlah anggaran ketahanan bencana di Kota Pekalongan sebesar 5,45 persen terhadap total anggaran belanja pada APBD-P Tahun 2022.
 - Besaran anggaran untuk kebutuhan infrastruktur pengendali banjir menjadi prioritas pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu anggaran kebencanaan dialokasikan untuk meningkatkan pengetahuan dan penyediaan logistik untuk perlindungan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- Selain itu, upaya untuk merespon kebutuhan kelompok rentan dalam isu kebencanaan juga dialokasikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui urusan sosial sebesar 0,85% terhadap total anggaran ketahanan bencana tahun 2022. Upaya penanggulangan bencana, pembangunan infrastruktur pengendali bencana banjir dan pembangunan perumahan untuk korban bencana menjadi prioritas pembangunan dalam RPKD tahun 2022.

5. Analisis Penandaan Anggaran Daerah untuk Ketahanan Pangan

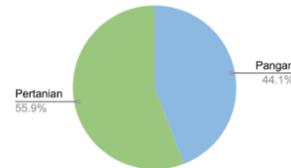
Persentase Anggaran Empat Sektor Ketahanan Pangan Terhadap Total Anggaran Ketahanan Pangan Tahun 2022



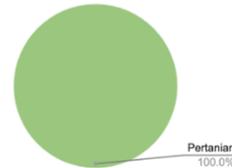
1. Persentase Anggaran Ketersediaan Pangan Berdasarkan Urusan Pemda Terhadap Total Anggaran Ketersediaan Pangan Tahun 2022



2. Persentase Anggaran Keamanan Pangan Berdasarkan Urusan Pemda Terhadap Total Anggaran Keamanan Pangan Tahun 2022



3. Persentase Anggaran Kapasitas Petani Berdasarkan Urusan Pemda Terhadap Total Anggaran Kapasitas Petani Tahun 2022



- Selain perubahan iklim dan ketahanan bencana, tematik dalam penandaan anggaran juga menganalisis komitmen kebijakan anggaran terhadap ketahanan pangan di Kota Pekalongan. Berdasarkan analisis penandaan anggaran terdapat empat kategori dalam isu ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, keamanan pangan, akses pangan dan kapasitas petani untuk mendukung upaya ketahanan pangan.
- Total anggaran ketahanan pangan Kota Pekalongan sebesar 0,36% terhadap total APBD-P tahun 2022 atau sebesar (Rp 3,876,017,000). Merujuk pada anggaran tersebut, sebesar 72,56% terhadap total anggaran ketahanan pangan Kota Pekalongan tahun 2022 merupakan anggaran untuk mendorong Ketersediaan pangan.
- Anggaran peningkatan kapasitas petani juga memiliki alokasi yang cukup besar, yaitu 23,23% atau sebesar Rp 900,377,000. Anggaran ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan petani sehingga secara tidak langsung juga dapat memperkuat ketahanan pangan di Kota Pekalongan.
- Anggaran keamanan pangan memiliki alokasi yang cukup rendah, yaitu sebesar 4,81% terhadap total APBDP Kota Pekalongan tahun 2022 (atau sebesar Rp 163,283,000). Anggaran tersebut digunakan untuk memastikan keamanan pangan mulai dari aspek saprodi hingga kualitasnya. Rendahnya anggaran keamanan menjadi catatan bagi pemerintah untuk memperhatikan kualitas pangan agar menunjang kesehatan masyarakat dan sebaiknya juga menggunakan produk-produk ramah lingkungan.

Namun sayangnya, belum teridentifikasi alokasi anggaran untuk meningkatkan akses pangan di Kota Pekalongan. Anggaran terhadap akses pangan menjadi catatan untuk mulai menyusun alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Hal ini yang penting mengingat ketersediaan pangan belum dapat dijangkau oleh masyarakat jika masyarakat sulit mengakses distribusi pangan.